



**KEPALA DESA DUKUHBANGSA
KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA DUKUHBANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHBANGSA
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUKUHBANGSA**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 16);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Pelaksanaan Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Standard Harga Satuan Desa;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Standard Harga Satuan Tahun 2026;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Standard Pelayanan Minimal Desa;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;

23. Peraturan Desa Dukuhbangsa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Dukuhbangsa Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Dukuhbangsa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
25. Peraturan Desa Dukuhbangsa Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
26. Peraturan Desa Dukuhbangsa Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dukuhbangsa Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Dukuhbangsa Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Kewenangan Desa Berdasrkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Dukuhbangsa Tahun 2026 Nomor 7);
28. Peraturan Desa Dukuhbangsa Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades di Desa Dukuhbangsa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Dukuhbangsa Tahun 2026 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHBANGSA
Dan
KEPALA DESA DUKUHBANGSA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHBANGSA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DUKUHBANGSA Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.048.317.300,-
2. Belanja Desa	Rp	1.107.857.610,-
Surplus/Defisit	Rp	(59.540.310),-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	85.540.310,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	26.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	59.540.310,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBDes
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Nama Cadangan;
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini;

Pasal 5

- (1). Pemeritah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2). Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (3.) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan non formal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. bersekala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Keadaan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

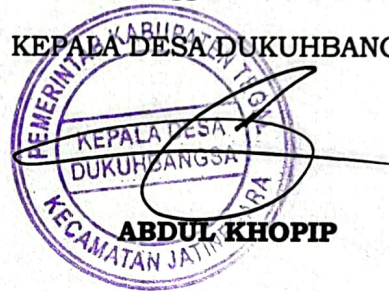
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dukuhbangsa.

Ditetapkan di : Dukuhbangsa
Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA DUKUHBANGSA,



Diundangkan di : Dukuhbangsa
Pada tanggal : 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA DUKUHBANGSA



LEMBARAN DESA DUKUHBANGSA NOMOR 4 TAHUN 2025

LAMPIRAN
PERATURAN DESA DUKUHBANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DUKUHBANGSA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.048.317.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.048.317.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>566.002.039,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	458.680.535,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.091.615,00	ADD, DLL
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	62.091.615,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	235.390.300,00	ADD, DLL
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	235.390.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.852.052,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.852.052,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	39.374.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.374.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.314.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.314.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.009.932,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	709.932,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.448.636,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.448.636,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	11.000.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.853.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	4.853.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	4.853.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.000.000,00	PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.720.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	11.100.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.700.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	10.920.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.848.504,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.330.798,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.330.798,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dli)	3.938.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.938.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.200.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.562.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.562.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.067.706,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.067.706,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	5.750.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	36.900.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.5.91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	30.400.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>430.985.298,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	20.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	14.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	6.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	377.784.447,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	41.757.357,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	41.757.357,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	150.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	176.027.090,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	176.027.090,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	22.500.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	12.000.000,00	PBH
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.92		Pengadaan Instalasi Penerangan Jalan Desa/Pemukiman/Gang	10.500.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	851,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	851,00	PAD
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	851,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>43.262.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.912.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.912.000,00	ADD, PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.912.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	8.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.350.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.350.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>19.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	19.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	19.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>48.608.273,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	28.608.273,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	28.608.273,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.608.273,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.107.857.610,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(59.540.310,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	85.540.310,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	59.540.310,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DUKUHBANGSA, 12 March 2026

KEPALA DESA

ABDUL KHOFIP

**RINGKASAN APBDesa PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA DUKUHBANGSA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	454.632.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	454.632.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	454.632.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	362.225.684,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.729.140,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	242.620.560,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.852.052,00	
5.1.4.	Tunjangan BPD	32.023.932,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.940.342,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.655.706,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	47.590.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	50.944.636,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.150.000,00	
	JUMLAH BELANJA	471.166.026,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.534.026,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	37.534.026,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	37.534.026,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	21.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	21.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	16.534.026,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DUKUH BANGSA, 12 March 2026
KEPALA DESA

ABDUL KHOIR
KECAMATAN JATINEGARA

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA DUKUHBANGSA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	359.695.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	359.695.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	359.695.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.770.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	27.900.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.700.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	4.120.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.600.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	15.700.000,00	
5.3.	Belanja Modal	266.137.447,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	9.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	4.853.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	176.517.090,00	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	41.757.357,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	34.010.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	48.608.273,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	48.608.273,00	
	JUMLAH BELANJA	400.515.720,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.820.720,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	45.820.720,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	45.820.720,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	40.820.720,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



RINGKASAN APBDesa PER SUMBER DANA PEMERINTAH DESA DUKUHBANGSA TAHUN ANGGARAN 2026			
Jenis APBDes : APBDes Awal			
Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	83.990.300,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	83.990.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	83.990.300,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.042.798,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.830.798,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	36.300.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	18.912.000,00	
5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	8.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	84.042.798,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(52.498,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.498,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.498,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	52.498,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINGKASAN APBDesa PER SUMBER DANA
PEMERINTAH DESA DUKUHBANGSA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

Sumberdana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	150.000.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	150.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	150.000.000,00	
5.	BELANJA		
5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	150.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	150.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DUKUH BANGSA, 16 March 2026

KEPALA DESA

KEPALA DESA
DUKUH BANGSA

ABDUL KHOPIF

KECAMATAN JATINEGARA

RINGKASAN APBDesa PER SUMBER DANA PEMERINTAH DESA DUKUHBANGSA TAHUN ANGGARAN 2026			
Jenis APBDes : APBDes Awal			
Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	2.132.215,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	362.475,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.769.740,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.132.215,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.132.215,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.132.215,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.132.215,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	2.132.215,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



RINGKASAN APBDesa PER SUMBER DANA PEMERINTAH DESA DUKUHBANGSA TAHUN ANGGARAN 2026			
Jenis APBDes : APBDes Awal			
Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa			
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	851,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	851,00	
	JUMLAH BELANJA	851,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(851,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	851,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	851,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	851,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

